

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. S. (2006). *Korupsi serta Pembalikan Beban Pembuktian, Ctk.Kedua.*, Kantor Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, Serta Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Ahmad, H., & Santoso, A. (2006). *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Fajar Mulia.
- Ahmad Sudiro serta Deni Bram, *Hukum serta Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, Cet ke 1., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Ahmad Zaenal Fanani, “Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim”, *Artikel Ini Pernah dimuat Di Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011
- Aldi Naradwipa serta Reza Priyambodo, Tinjauan Terkait System Pembuktian Terbalik (*Reversal Of Burden Proof*) dalam Pemeriksaan Perkara Gratifikasi, *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, 03, 02, 2015
- Ali, M., & Nurhidayat, S. (2011). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. Gramata Publishing.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013
- Andrey Sujatmoko, “Theory, Prinsip serta Kontroversi Ham”, *Jurnal Sejarah*
- Anti Korupsi, dalam <http://www.antikorupsi.org> diakses pada tanggal 20 Februari 2022
- Apeldoorn, L. J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Enam (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
- Arinanto, S. (2008). *HAM dalam Transisi Politik di Indonesia.*. Pusat Study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Armunanto Hutahaean, Erlyn Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam System Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No.1 - Maret 2019 : 27-41
- Asshiddiqie, J. (1997). *Theory & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Ind. Hill.Co.
- Atmasasmita, R. (2011). *Masalah Implementation Konvensi Anti Korupsi 2003*. Artikel Hukum Dalam Harian Seputar Indonesia Edisi Tanggal 13 April

2011.

Bungin, B. (2007). *Metodologi Pengamatan Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*,. PT. Rajagrafindo Persada.

Davidson, S. (1994). *HAM: Sejarah Theory serta Praktek dalam Pergaulan Internasional*,. Pustaka Utama Grafiti.

Diansyah, F. (2009). Senjakala Pemberantasan Korupsi: Memangkas Akar Korupsi dari Pengadilan Tipikor. *Jurnal Konstitusi*, 6(2).

Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. PT. Refika Aditama.

Darji Darmodiharjo serta Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa serta Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006

Ebta Setiawan, *Arti Atau Makna Pembuktian* dalam [http:// KBBI.web.id/arti atau makna pembuktian](http://KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian)

Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Cet. 1., Bandung: Pustaka Setia, 2012

El, M. M. (2004). *HAM Dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana.

Elwi, D. (2012). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Serta Pemberantasan*,. Rajawali Press.

Elwi Sertail, “Implikasi HAM (HAM) Penerapan System Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi”, *Orasi Ilmiah pada Pengukuhan guru Besar pada Universitas Andalas*, diunduh dari [hyuchink.blogspot.com/2012/04/implikasi-hak-asasimanusia-ham.html](http://hyuchink.blogspot.com/2012/04/implikasi-hak-asasimanusia-ham.html)

Faiz, Pan Mohamad, “Theory Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 No 1, 2009

Febri Diansyah, Illian Deta Arta Sari, *Independent Repost Corruption Assessment and Compliance United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* (by. Indonesia Corruption Watch (ICW)), 2003

Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa serta Nusamedia, 2004

Hafidz, J. (2009). Efektifitas Pelaksanaan System Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia. *Sultan Agung*, 14(118), 39–64.

- Hamzah, A. (2005). *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*,. Sinar Grafika.
- Hamzah, J. A. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2008). *Pembahasan Permasalahan serta Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sisertag Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Indonesia, Undang-Undang Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 31, LN No. 140 Thn 1998, TLN. No 387, Penjelasan Umum.* (n.d.).
- Jaya, N. S. P. (2008). *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti
- Jeremy Pompe, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen System Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 8. No. 2-Juni 2011. <http://www.djpp.depkmham.go.id/arsip/artikel/jurnal/jli8n2.pdf>
- Kaligis, O. C. (2006). *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, ctk. Pertama*. Penerbit Alumni Bandung.
- Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. (2008). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Kansil, C., Christine, Kansil, S. ., R, E., Palandeng, & Mamahit, G. N. (2009). *Kamus Istilah Hukum*,.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum serta Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kartayasa, M. (2017). *Korupsi Serta Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Serta HAM*. Kencana.
- Kartonegoro. (n.d.). *Diktat Kuliah Hukum Pidana*,. Balai Lektur Mahasiswa.
- Kelsen, Hans, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011
- Laurent Pech, “*Rule of Law in France*”, dalam Randall Peerenboom, *Asian Discourses of Rule of Law*, RoutledgeCurzon, London.

Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, Bandung, 2007

Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam System Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*. Bandung: P.T Alumni, Cet. kedua, 2003

Locke, J. (1964). *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*,. Oxford University Press

Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011

Malian, S., & Marzuki, S. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan serta HAM*. UII Press.

Martiman Prodjohamidjojo, *System Pembuktian serta Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, 1983

Moeljatno. (2003). *Perbuatan Pidana serta Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Diesrede UGM.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*,. Rineka Cipta

Muh Arief Syahroni, M Alpien, serta Syofyan Hadi. "Pembalikan Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal ilmu hukum*, Agustus, 2019- Januari, 2020

Muhammad, A. (2004). *Hukum serta Pengamatan Hukum*,. PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012

Mulyadi, L. (2011). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik serta Masalahnya*,. Alumni.

*No Title*. (n.d.). [e-dokumen.kemenag.go.id/files/WE8qkJdK1346383974.pdf](http://e-dokumen.kemenag.go.id/files/WE8qkJdK1346383974.pdf)

*Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang No 31 Thn 1999 Terkait Tindak Pidana Korupsi*. (n.d.).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009

- Prakoso, D., & Imunarso, A. (2011). *Hak Asasi Tersangka serta Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara.
- Prodjohamidjojo, M. (2001). *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 31 Thn 1999)*. Mandar Maju.
- R. Subekti. (2008). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Rasjidi, L., & Thania, I. (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*,. Mandar Maju.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami serta Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo.
- Razif Novwan Putranto & Law Firm, *Asas Pembuktian Terbalik*, diunduh dari <http://www.rnplawfirm.com/?p=publication&id=8&title=azaz-pembuktian>
- Reksodiputro, M. (1994). *HAM dalam System Peradilan Pidana*,. Pusat Pelayanan Keadilan serta Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Rukmini, M. (2003). *Perlindungan HAM melalui Azas Praduga Tidak Bersalah serta Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada System Peradilan Pidana Indonesia, Ctk. Pertama*. Alumni.
- Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2011
- Sangaji, W. (2004). *Tindak Pidana Korupsi*. Aditya Bhakti.
- Sanusi, M. A. (2009). Relasi Antara Korupsi serta Kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2).
- Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, mendulang Rente di Lingkar Istana, *Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara serta Modal*, Edisi 14, Thn III, 2002
- Sidharta Arief, *Meuwissen Terkait Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Theory Hukum serta Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007
- Smith, R. K. M. (2008). *Hukum HAM*,. PUSHAM UII.
- Soekanto, S. (1984). *Pengamatan Hukum Normatif*,. Rajawali Press.
- Soeroso. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*,. PT. Sinar Grafika.
- Sumaryanto, A. D. (2009). *Pembalikan Beban Pembuktian*. PT.Prestasi Pustakaraya.



Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai HAM (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–68. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167/156>

Syahrani, & Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti.

Syukri Akub & Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam System Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012

Triyanto, *Negara Hukum serta HAM*, Yogyakarta: Ombak, 2013

Waluyadi. (2004). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa serta Praktisi*,. Mandar Maju

Wicipto Setiadi, “Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, serta Upaya Pemberantasan, Serta-Regulasi)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15, 03, November, 2018

Wiriadinata, W. (2017). Korupsi Serta Pembalikan Beban Pembuktian. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(1), 117. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1508>.

Yunus, H. (2009). *Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Pustaka Sinar Harapan.

Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press.